



Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Pembentukan Karakter Moderat Warganegara

M. Yunasri Ridhoh^{1*}, Indrawati Syamsuddin², Nurul Fajariah³

¹Universitas Negeri Makassar, Indonesia

²Universitas Haluoleo, Indonesia

³Politeknik Negeri Tanah Laut, Indonesia

ABSTRAK

Indonesia merupakan bangsa yang memiliki kemajemukan yang kompleks, komplit dan berlapis. Dalam masyarakat yang majemuk seperti ini, sering muncul ketegangan bahkan konflik antar kelompok identitas yang dapat berdampak pada melemahnya kohesi sosial serta mengancam keberlanjutan integrasi nasional. Oleh karena itu, diperlukan karakter moderat pada seluruh elemen bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengkaji relevansi antara kelas Pendidikan Kewarganegaraan dengan pembentukan karakter moderat warga negara. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah: (1) dalam kehidupan yang beragam diperlukan upaya moderasi warga negara melalui tata nilai dan tata ilmu; (2) tata nilai dan tata ilmu merupakan fungsi utama dari kelas Pendidikan Kewarganegaraan; (3) karakter moderat warga negara meliputi komitmen kebangsaan, toleransi, cinta damai, dan keadilan; (4) moderasi warga negara tidak bertujuan menghapus identitas, melainkan menata cara hidup yang berada di posisi tengah, seimbang, mencegah kekerasan, mengurangi ekstremisme, dan tidak berlebihan. Kesimpulan penelitian ini bahwa PKn tidak hanya berfungsi sebagai media transmisi pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang transformasi nilai dan karakter moderat.

INFORMASI ARTIKEL

Received: 10 April 2026;

Revised: 12 April 2026.;

Accepted: 26 April 2026;

Published: 1 Juni 2026.

KATA KUNCI

Karakter moderat;

Komitmen kebangsaan

Moderasi warga negara;

Multikultural;

Pendidikan

kewarganegaraan.

Copyright © 2026 (M. Yunasri Ridhoh). All Right Reserved

 yunasri.ridhoh@unm.ac.id*

How to Cite: Ridhoh, M. Y., Syamsuddin, I., & Fajariah, N. (2026). Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Pembentukan Karakter Moderat Warganegara. *Indonesian Journal of Civic and Law Studies*, Vol. 2 (1), halaman 1-12.

Pendahuluan

Indonesia adalah bangsa yang oleh Tuhan YME diberikan dua takdir utama sekaligus, yakni (1) takdir geografis, dan (2) takdir sosiologis. Takdir geografis membuat manusia Indonesia menjalani hidup di wilayah lebih dari 7 juta kilometer persegi (km²), dengan 75% diantaranya adalah wilayah perairan dengan garis pantainya terpanjang ke-2 di dunia (95,181 km). Diantara itu terdapat juga lebih dari 16.771 pulau dengan potensi serta kekayaan alam yang melimpah di dalamnya (BPS 2020). Suasana geografis dan kekayaan alam Indonesia dengan sangat baik digambarkan oleh Crawford (dalam Nasir, 2019) sebagai sebuah wilayah kepulauan yang berada di antara bangsa-bangsa besar dan beradab di kawasan Asia Pasifik. Bentangan alamnya subur, nyaman, indah, kaya raya, dan tidak ekstrem seperti beberapa wilayah di belahan bumi lain misalnya jazirah Arabia. Bahkan secara metaforik Multatuli (1820-1887) menggambarkannya sebagai untaian “Zamrud di Khatulistiwa” (*The Emerald of Equator*), yang di dalamnya menurut Koes Ploes “tongkat dan batu pun jadi tanaman”. Kedua metafora itu menceritrakan kepada generasi kita bahwa Indonesia adalah negeri yang indah, subur, dan makmur yang dalam ungkapan Jawa kuno disebut sebagai *gemah ripah loh jinawi*.

Adapun takdir sosiologis bangsa Indonesia, mengutip data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (2022), jumlah penduduk Indonesia mencapai 275,36 juta jiwa pada Juni 2022, yang menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia. Dari jumlah tersebut, terdapat 190,83 juta jiwa (69,3%) penduduk Indonesia yang masuk kategori usia produktif (15-64 tahun). Sementara sisanya, yakni 84,53 juta jiwa (30,7%) masuk dalam kategori usia tidak produktif. Inilah yang disebut sebagai bonus demografi. Tentu ini adalah kenyataan istimewa yang Indonesia miliki. Hal penting lainnya yang perlu diketahui ialah manusia Indonesia menjalani hidup dalam suasana yang super majemuk. Dimana terdapat beragam suku, bahasa, agama, kebudayaan, kepercayaan, adat istiadat, dls. Data BPS (2020) menjelaskan bahwa Indonesia memiliki lebih 1.300 suku bangsa, 668 bahasa daerah, memiliki 431.465 kelompok ormas, 6 agama resmi + 184 aliran kepercayaan dan masih banyak lapis keragaman lainnya. Keragaman tersebut kemudian ditunen dalam 4 (empat) konsensus kebangsaan (MPR RI menyebutnya 4 pilar), yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Keempat konsensus tersebut menjadi pilar pemersatu dari takdir-takdir keindonesiaan tersebut.

Namun keragaman tersebut terus dihantui oleh ancaman disintegrasi, setidaknya tampak dari berkembangnya paham fanatisme, ekstrimisme dan terorisme yang diekspresikan dalam bentuk kekerasan. Data Fathurozi (2017) mengungkapkan beberapa konflik yang mengganggu kohesi sosial dan integrasi nasional tampak dalam peristiwa, misalnya pertama, tahun 1998, konflik berbasis etnis antara pribumi dan Tionghoa. Kedua, konflik berbasis agama di Ambon dan Poso pada tahun 1999. Ketiga, pada tahun 2000 kembali terjadi konflik antar kelompok agama, lebih tepatnya persekusi dan kekerasan terhadap warga Ahmadiyah dan Syiah. Keempat, pada tahun 2001 terjadi konflik suku di Sampit, antara suku Dayak dan Madura. Kelima, tahun 2012 terjadi konflik di Sampang Madura. Konflik ini melibatkan dua kelompok aliran dalam Islam yakni komunitas Muslim Syiah dan Sunni. Keenam, pada tahun 2015 terjadi konflik agama di Tolikara, Papua, konflik tersebut melibatkan antara kelompok Muslim dan Kristen.

Untuk mencegah terjadinya kekerasan dan konflik berbasis identitas yang terus berulang, diperlukan upaya sistematis dalam pembangunan karakter bangsa (*nation and character building*), khususnya penguatan karakter moderat pada seluruh elemen masyarakat. Sejumlah studi mutakhir menunjukkan bahwa meningkatnya polarisasi sosial, intoleransi, serta

penyebaran ujaran kebencian di ruang digital menjadi tantangan serius bagi kohesi sosial dan demokrasi (misalnya temuan dalam laporan UNESCO (2023) tentang pendidikan kewargaan global dan riset Setara Institute (2024) mengenai tren intoleransi di Indonesia). Dalam konteks ini, karakter moderat, yang ditandai dengan sikap toleran, inklusif, dialogis, dan anti-kekerasan, menjadi kebutuhan mendesak untuk ditanamkan melalui jalur pendidikan formal. Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2012 dan Kepdirjen Dikti No. 84/E/KPT/2020 Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan mata pelajaran dan mata kuliah wajib di setiap jenjang pendidikan, memiliki posisi strategis sebagai wahana pembentukan karakter tersebut.

Namun demikian, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) yang cukup signifikan. Sebagian besar kajian sebelumnya masih berfokus pada aspek normatif PKn sebagai pendidikan nilai dan demokrasi, atau pada implementasi pendidikan karakter secara umum, tanpa secara spesifik mengkaji bagaimana pembelajaran PKn secara pedagogis mampu membentuk karakter moderat warganegara dalam konteks masyarakat multikultural dan era digital. Selain itu, masih terbatas penelitian yang mengintegrasikan konsep moderasi beragama dan sosial ke dalam praksis pembelajaran PKn secara aplikatif dan kontekstual.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini mengajukan pertanyaan utama: (1) bagaimana urgensi pembentukan karakter moderat warganegara dalam konteks sosial kontemporer? (2) bagaimana peran dan praktik pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam membentuk karakter moderat tersebut? (3) sejauh mana relevansi materi, metode, dan evaluasi dalam PKn mendukung internalisasi nilai-nilai moderasi? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis urgensi karakter moderat warganegara, mengkaji peran strategis PKn dalam pembentukannya, serta merumuskan model konseptual pembelajaran PKn yang berorientasi pada penguatan karakter moderat.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada upaya menggeser Pendidikan Kewarganegaraan dari sekadar transmisi nilai normatif menuju pendekatan pedagogis-aplikatif yang secara eksplisit mengintegrasikan nilai-nilai moderasi dalam desain pembelajaran. Penelitian ini tidak hanya memotret hubungan antara PKn dan pendidikan karakter, tetapi juga menawarkan sintesis konseptual yang menempatkan PKn sebagai instrumen strategis dalam membangun moderasi warganegara di tengah tantangan polarisasi identitas dan disrupsi digital. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan pendidikan kewarganegaraan yang lebih kontekstual, relevan, dan transformatif.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR), yaitu metode yang dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi secara kritis, mengintegrasikan, dan menyajikan temuan dari berbagai studi yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan sintesis komprehensif terhadap perkembangan kajian Pendidikan Kewarganegaraan dan pembentukan karakter moderat warganegara dari berbagai konteks penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan literatur yang diperoleh melalui pencarian pada beberapa basis data ilmiah, yaitu *Google Scholar*, *ScienceDirect*, dan *Taylor & Francis Online*.

Pemilihan sumber data tersebut didasarkan pada pertimbangan akademik dan metodologis. Google Scholar digunakan karena memiliki cakupan yang luas dan mampu menjangkau berbagai jenis publikasi ilmiah, termasuk artikel nasional dan internasional, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh gambaran umum dan kontekstual terkait topik

yang dikaji. Sementara itu, *ScienceDirect* dan *Taylor & Francis Online* dipilih karena merupakan basis data bereputasi yang menyediakan artikel-artikel jurnal internasional terindeks dan telah melalui proses *peer-review*, sehingga menjamin kualitas, validitas, dan reliabilitas sumber yang digunakan. Dengan mengombinasikan ketiga sumber tersebut, penelitian ini berupaya memperoleh literatur yang tidak hanya luas secara cakupan, tetapi juga kuat secara kualitas akademik.

Menurut Creswell (2014), SLR merupakan bagian dari studi yang menganalisis isi teks tertulis, artefak visual, maupun rekaman untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam terhadap suatu fenomena. Berdasarkan hal tersebut, penulisan artikel ini difokuskan pada analisis isi teks tertulis dari literatur yang telah dikumpulkan dari ketiga basis data tersebut.

Proses SLR dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: (1) identifikasi literatur melalui penelusuran kata kunci yang relevan; (2) klasifikasi dan seleksi literatur; serta (3) penentuan literatur berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi dalam penelitian ini meliputi: (a) artikel yang membahas Pendidikan Kewarganegaraan sebagai wahana pembentukan karakter, (b) artikel yang mengkaji konsep moderasi warganegara, serta (c) publikasi ilmiah yang relevan dengan konteks pendidikan dan kewargaan. Sementara itu, kriteria eksklusi mencakup literatur yang tidak relevan dengan fokus kajian, tidak memiliki kejelasan metodologi, atau tidak berasal dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Dengan tahapan dan kriteria tersebut, diharapkan hasil kajian ini memiliki validitas dan kedalaman analisis yang memadai.

Hasil dan pembahasan

Dalam 10 tahun terakhir atau dari rentang pencarian 2015-2025 ditemukan 1.614 literatur yang terkait dengan topik, dengan sebaran literatur sejumlah 1.560 pada *Google Scholar*, 50 literatur pada *Taylor & Francis Online*, serta 4 literatur pada *ScienceDirect*. Kemudian diseleksi sesuai dengan kriteria inklusi-eksklusi sehingga menghasilkan 15 literatur paling relevan.

Tabel 1. Deskripsi Temuan Literatur Utama Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Pendidikan Karakter Moderat

No	Nama Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Juliardi	2015	Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Pendidikan Kewarganegaraan	PKn efektif membentuk karakter sesuai nilai Pancasila di tengah degradasi moral generasi muda.
2	Akbal	2016	Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun Karakter Bangsa	PKn berperan strategis dalam membangun karakter bangsa sebagai indikator eksistensi negara.
3	Ruget	2016	The Renewal of Civic Education in France and in America	PKn menjadi solusi atas apatisme politik dan meningkatnya kekerasan di kalangan pelajar.
4	Baisuki	2017	Pendidikan Karakter Moderat di Ma'had Aly Situbondo	Model integrasi akademik dan kehidupan santri efektif menanamkan karakter moderat.

5	Tan, Naidu & Zuraini	2018	Moral Values and Good Citizens in a Multi-Ethnic Society	Pendidikan moral dalam masyarakat multietnis memperkuat persatuan dan legitimasi sosial.
6	Suryadi & Winataputra	2019	Pendidikan Kewarganegaraan dan Penguatan Civic Disposition	PKn tidak hanya membangun pengetahuan, tetapi juga sikap kewargaan (civic disposition).
7	Faruq, Umar & Noviani	2020	Internalisasi Nilai Islam Nusantara dalam Pembentukan Karakter Moderat	Integrasi nilai lokal-religius efektif membentuk karakter moderat yang kontekstual.
8	Anbiya & Asyafah	2020	PKn Berbasis Unity of Science	Pendekatan spiritual-ilmiah memperkuat moderasi beragama dalam pembelajaran PKn.
9	Winarno & Wahab	2021	Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Multikultural	PKn berperan dalam menanamkan toleransi dan mengelola keberagaman masyarakat.
10	Muhkam	2022	The Role of Civic Education Learning in University as Moderate Education	PKn mampu membentuk sikap moderat, demokratis, dan menghargai pluralisme.
11	Hidayat & Sapriya	2022	Penguatan Moderasi Beragama melalui PKn	PKn berkontribusi dalam membangun sikap moderasi beragama di kalangan pelajar.
12	Prasetyo & Komalasari	2023	Civic Education and Digital Citizenship	PKn penting dalam membentuk karakter moderat di era digital dan media sosial.
13	Nurhayati et al.	2023	Pendidikan Karakter Moderat Berbasis Kearifan Lokal	Kearifan lokal menjadi basis efektif dalam menanamkan nilai moderasi.
14	Rahman & Suharno	2024	Transformasi PKn dalam Menghadapi Polarisasi Sosial	PKn berperan mereduksi polarisasi dan konflik identitas dalam masyarakat modern.
15	Putra & Dewi	2025	Inovasi Pembelajaran PKn untuk Karakter Moderat	Inovasi pembelajaran berbasis dialog dan refleksi memperkuat karakter moderat siswa.

Dikembangkan oleh peneliti dari *DataBase Google Scholar, ScienceDirect dan Taylor & Francis Group*

Penelitian di atas mengungkapkan dan menjawab setidaknya 3 (tiga) hal:

Urgensi Karakter dan Moderasi Warganegara

Penelitian-penelitian yang dirangkum dalam tabel di atas secara konsisten mengungkap adanya gejala degradasi moral, ketandusan etos kewargaan, serta melemahnya kepatuhan terhadap norma sosial, hukum, dan nilai-nilai kebangsaan. Fenomena ini ditandai dengan meningkatnya kekerasan sosial, konflik berbasis identitas, serta menurunnya rasa hormat dan tanggung jawab sebagai warga negara (Juliardi, 2015; Azra, 2012). Jika diinterpretasikan lebih

lanjut, temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa krisis yang terjadi bukan sekadar persoalan perilaku individual, melainkan mencerminkan melemahnya dimensi *civic disposition* dalam kehidupan berbangsa, yaitu sikap, nilai, dan karakter yang seharusnya menjadi fondasi utama kewarganegaraan.

Temuan Akbal (2016) yang menekankan bahwa keberlangsungan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kekuatan karakter warganya memperkuat argumen tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian lain yang menegaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya berfungsi sebagai transmisi pengetahuan (*civic knowledge*), tetapi juga sebagai sarana pembentukan sikap dan karakter kewargaan (*civic disposition*) (Suryadi & Winataputra, 2019; Winarno & Wahab, 2021). Dengan demikian, terdapat kesamaan pandangan bahwa krisis moral dan sosial yang terjadi saat ini berakar pada belum optimalnya fungsi pendidikan dalam membentuk karakter warganegara yang moderat, toleran, dan bertanggung jawab.

Di sisi lain, beberapa penelitian juga menunjukkan variasi pendekatan dalam merespons persoalan tersebut. Misalnya, Faruq, Umar, dan Noviani (2020) menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai kearifan lokal dan religius sebagai basis pembentukan karakter moderat, sementara Anbiya dan Asyafah (2020) menawarkan pendekatan *Unity of Science* yang mengintegrasikan dimensi spiritual dalam pembelajaran PKn. Perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kesamaan dalam melihat urgensi karakter, terdapat perbedaan strategi konseptual dalam menguatkan moderasi warganegara, yang menandakan ruang pengembangan yang masih terbuka dalam kajian ini.

Implikasi teoritis dari temuan ini adalah perlunya reposisi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai disiplin yang tidak hanya berorientasi pada aspek kognitif, tetapi juga secara integratif mengembangkan dimensi afektif dan moral sebagai inti dari pembentukan karakter moderat warganegara. Sementara itu, secara praktis, temuan ini menuntut adanya inovasi dalam desain pembelajaran PKn, baik melalui pendekatan kontekstual, integrasi nilai lokal dan religius, maupun penguatan praktik dialogis dan reflektif di kelas. Dengan demikian, Pendidikan Kewarganegaraan dapat berfungsi lebih optimal sebagai wahana strategis dalam merespons krisis karakter dan memperkuat kohesi sosial serta integrasi nasional.

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Kenyataan yang digambarkan oleh Azra (2012), Juliardi (2015), Fathurozi (2017) dan Latif (2021) tentang ancaman ketandusan etos kewargaan merupakan hal yang tidak bisa diabaikan lagi atau dianggap sepele. Kenyataan sosial yang kita alami dan hadapi telah cukup menyadarkan bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara masih perlu ditata secara komprehensif, baik dalam tata nilai, tata ilmu, tata laku, maupun tata kelola, guna menghentikan dan mencegah erosi moral serta ketandusan etika tersebut. Dalam konteks ini, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) diposisikan sebagai ujung tombak dalam membentuk warga negara yang ideal. Tujuan PKn adalah mengembangkan potensi individu agar memiliki wawasan, watak, dan keterampilan kewargaan yang memadai, sehingga mampu berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Merujuk pada pandangan Juliardi (2015) dan Akbal (2016), tujuan utama PKn adalah membentuk karakter bangsa yang baik dan cerdas sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Karakter bangsa menjadi penentu eksistensi dan keberlanjutan suatu negara. Dalam konteks komparatif, praktik di Malaysia (Thambosamy & Elier, 2013) menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan juga diarahkan untuk memperkuat keragaman budaya, keadilan sosial, serta melawan marginalisasi dan diskriminasi. Hal ini menegaskan bahwa PKn memiliki posisi

strategis dan universal dalam membentuk karakter warga negara di berbagai konteks kebangsaan.

Lebih lanjut, hasil penelitian mutakhir yang dirangkum dalam tabel menunjukkan bahwa tujuan PKn mengalami perkembangan yang semakin kontekstual dengan tantangan zaman. Hidayat dan Sapriya (2022) menegaskan bahwa PKn berperan penting dalam penguatan moderasi beragama di kalangan pelajar. Prasetyo dan Komalasari (2023) menunjukkan bahwa PKn juga harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi melalui penguatan *digital citizenship*, guna membentuk karakter moderat di ruang digital. Sementara itu, Nurhayati et al. (2023) menekankan pentingnya kearifan lokal sebagai basis nilai dalam pendidikan karakter moderat.

Jika diinterpretasikan lebih dalam, temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa tujuan PKn telah mengalami perluasan makna, dari yang semula berfokus pada pembentukan warga negara yang “baik” secara normatif, menjadi pembentukan warga negara yang adaptif, reflektif, dan kontekstual terhadap dinamika sosial. Moderasi beragama, literasi digital, dan kearifan lokal bukanlah dimensi yang berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi dalam membentuk karakter moderat yang utuh. Hal ini juga mengindikasikan bahwa krisis kewargaan yang terjadi tidak cukup diatasi dengan pendekatan tunggal, tetapi memerlukan pendekatan multidimensional yang terintegrasi dalam pembelajaran PKn.

Selain itu, Rahman dan Suharno (2024) mengungkapkan bahwa transformasi PKn diperlukan untuk merespons meningkatnya polarisasi sosial dan konflik identitas. Putra dan Dewi (2025) juga menunjukkan bahwa inovasi pembelajaran berbasis dialog dan refleksi kritis efektif dalam membentuk karakter moderat siswa. Secara interpretatif, hasil ini menegaskan bahwa keberhasilan PKn sangat ditentukan oleh pendekatan pedagogis yang digunakan. Dengan kata lain, tujuan PKn tidak hanya ditentukan oleh apa yang diajarkan, tetapi juga bagaimana nilai-nilai tersebut diinternalisasikan melalui pengalaman belajar yang partisipatif, dialogis, dan reflektif. Dengan demikian, PKn bertransformasi dari sekadar instrumen normatif menjadi wahana praksis yang mampu membentuk karakter moderat warganegara secara nyata dalam kehidupan sosial.

Relevansi PKn dengan Karakter Moderat

Muhkam (2022) mengungkapkan bahwa secara spesifik pembelajaran PKn sangat sesuai dengan nilai-nilai moderat dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, terutama dalam hal menjaga suasana demokrasi, serta PKn juga berperan sebagai pendidikan multikultural untuk membentuk sikap moderat, karena mampu mengakomodasi pluralisme dan dapat meminimalisir praktik rasial. Karakter moderat menjadi penting mengingat Indonesia secara sosiohistoris sejak awal dilahirkan dalam keadaan majemuk bahkan super majemuk. Itulah sebabnya Indonesia memilih “bhineka tunggal ika” sebagai semboyannya, “bhineka” merupakan realita atau kenyataan, sementara “tunggal ika” merupakan harapan, mimpi dan cita-cita. Laning & Dwi (2008) mengungkapkan bahwa semboyan bhineka tunggal ika sesungguhnya jauh lebih tua dari negara Indonesia, semboyan ini telah ada sejak era Kerajaan Majapahit, setidaknya dibuktikan dalam kakawin Sutasoma yang dikarang Mpu Tantular dan diperkirakan disusun sekitar abad 14 masehi, ketika Prabu Hayam Wuruk menjadi raja di Kerajaan Majapahit.

Temuan ini, jika diinterpretasikan dengan hasil penelitian lain dalam tabel, menunjukkan bahwa PKn secara konseptual memang memiliki basis nilai yang kuat untuk membangun moderasi, baik melalui pendekatan multikultural (Tan, Naidu & Zuraini, 2018), integrasi nilai

religius-lokal (Faruq, Umar & Noviani, 2020), maupun penguatan dimensi sikap kewargaan (*civic disposition*) (Suryadi & Winatapura, 2019). Artinya, relevansi PKn dengan karakter moderat tidak bersifat normatif semata, tetapi telah teruji secara empiris dalam berbagai konteks.

Kemajemukan tersebut merupakan kekayaan yang tak ternilai, karena tidak semua negara memilikinya. Kemajemukan Indonesia di satu sisi merupakan berkah, namun di sisi lain dapat saja menjadi kutukan, tidaklah mengherankan Handoyo, dkk. (2015) dan Tan, Naidu & Zuraini (2018) mengatakan bagi masyarakat majemuk peluang terjadinya konflik sangat tinggi, sebab keragaman masyarakat ibarat pisau bermata dua, yang jika tidak dikelola dengan baik akan berubah menjadi bencana. Karena itu kemajemukan tersebut mesti dihayati dan dirawat dengan baik agar benar-benar menjadi anugerah, keberkahan dan keistimewaan yang Indonesia miliki. Tentu sebagai warga bangsa yang baik (*good citizen*) kita tidak ingin Indonesia mengalami hal demikian, misalnya mengalami balkanisasi, rusuh, konflik dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya, atau yang lebih buruk bernasib serupa Suriah yang hari-harinya dihantui pertikaian dan konflik bersenjata.

Kita juga tidak ingin melihat Indonesia bernasib seperti India dan Pakistan yang harus terpisah setelah mengalami perang saudara berkepanjangan oleh karena alasan iman. Juga serupa Bangladesh dan Pakistan yang bertikai karena alasan etnis, atau seperti Korea Selatan dan Korea Utara yang mesti terbelah menjadi dua negara setelah mengalami peperangan oleh karena perbedaan ideologi. Dalam konteks ini, hasil penelitian dalam tabel memperkuat bahwa PKn berfungsi sebagai instrumen preventif konflik. Hidayat & Sapriya (2022) menunjukkan bahwa penguatan moderasi beragama melalui PKn mampu membangun sikap toleran di kalangan pelajar, sementara Rahman & Suharno (2024) menegaskan bahwa transformasi PKn relevan dalam mereduksi polarisasi sosial dan konflik identitas. Interpretasi dari temuan ini menegaskan bahwa PKn tidak hanya berfungsi sebagai pendidikan nilai, tetapi juga sebagai mekanisme resolusi konflik sosial yang berbasis pendidikan.

Saat ini Indonesia telah berusia 80 tahun, usia yang sekalipun telah cukup lama bertahan sebagai bangsa yang berdaulat, tetapi belajar dari sejarah sebetulnya usia tersebut masih cukup muda dan rentan. Di masa lalu terdapat bangsa besar bernama Yugoslavia yang setelah 85 tahun berdiri akhirnya pecah, lalu lenyap yang kemudian menjelma 7 negara saat ini. Juga ada bangsa adidaya bernama Uni Soviet yang ternyata kejayaannya hanya mampu bertahan selama 74 tahun, setelahnya Uni Soviet juga bubar, lalu terpecah menjadi 15 negara seperti yang kita saksikan saat ini. Bukan tidak mungkin Indonesia juga mengalami hal yang sama. Di nusantara sendiri menurut Ricklefs (1991) juga pernah ada imperium raksasa bernama Kerajaan Majapahit yang diperkirakan berusia 234 tahun, tapi akhirnya runtuh dan musnah juga. Pernah pula ada kemaharajaan yang sangat kuat dan digdaya yakni Kerajaan Sriwijaya, yang menurut Prinanda (2021) hanya mampu bertahan sekitar 500 tahun.

Jika dihubungkan dengan hasil penelitian mutakhir, kondisi kerentanan tersebut semakin kompleks di era digital. Prasetyo & Komalasari (2023) menegaskan bahwa ruang digital menjadi arena baru pembentukan maupun konflik identitas, sehingga PKn perlu mengembangkan dimensi *digital citizenship* untuk membentuk karakter moderat di dunia maya. Hal ini diperkuat oleh temuan Ridhoh, Zahrah, & Sanur (2024) yang menunjukkan bahwa PKn dapat berkontribusi sebagai resolusi konflik beragama di ruang digital melalui penguatan literasi digital, dialog, dan etika komunikasi. Dengan demikian, relevansi PKn tidak hanya terbatas pada ruang kelas, tetapi juga meluas ke ruang virtual sebagai medan baru praktik kewarganegaraan.

Kenyataan tersebut memerlukan tata nilai, tata ilmu, tata laku serta tata kelola, agar fanatisme, ekstremisme, terorisme atau kekerasan berbasis identitas tidak merobek keharmonisan bangsa. Penataan empat hal tersebut dapat dibangun, dibentuk dan diselenggarakan melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Misalnya di dalam beragama, karena Indonesia adalah bangsa yang majemuk secara iman, maka diperlukan karakter moderat, agar ketika mengekspresikan imannya tidak dengan cara fanatik, ekstrem, atau kekerasan, melainkan dengan cara moderat yaitu seimbang dan adil. Muhkam (2022) mengungkapkan bahwa secara konten pembelajaran PKn sangat relevan dengan nilai karakter moderat masyarakat, agar senantiasa relevan maka konten itulah yang perlu selalu disesuaikan dengan konteks dimana ia diselenggarakan.

Namun mengharapkan hanya kelas PKn tidaklah cukup, Ruget (2016), Baisuki (2017) dan Winata, dkk. (2020) menjelaskan bahwa diperlukan pengintegrasian nilai-nilai dan praktik moderasi, baik dalam lingkungan akademik, maupun di luar lingkungan akademik atau di kehidupan sehari-hari. Temuan ini diperkaya oleh penelitian Nurhayati et al. (2023) yang menekankan pentingnya kearifan lokal sebagai basis internalisasi nilai moderasi, serta Putra & Dewi (2025) yang menunjukkan bahwa inovasi pembelajaran berbasis dialog dan refleksi kritis mampu memperkuat karakter moderat siswa. Secara interpretatif, hal ini menunjukkan bahwa efektivitas PKn sangat bergantung pada pendekatan pedagogis yang kontekstual, integratif, dan partisipatif.

Lebih jauh, secara konseptual, penguatan karakter moderat dalam PKn juga dapat dipahami sebagai upaya ideologis dalam meneguhkan Pancasila sebagai dasar moderasi berbangsa. Ridhoh & Haris (2026) menegaskan bahwa Pancasila merupakan ideologi moderat yang mampu menjadi instrumen mitigasi dan navigasi konflik identitas. Hal ini sejalan dengan temuan disertasi Ridhoh (2023) yang menunjukkan bahwa moderasi berkewarganegaraan melalui kelas PKn efektif dalam membentuk karakter cinta damai dan anti kekerasan. Dengan demikian, relevansi PKn dengan karakter moderat tidak hanya bersifat pedagogis, tetapi juga ideologis dan strategis dalam menjaga keberlangsungan bangsa.

Simpulan

Ketandusan etos kewargaan berupa fanatisme, sektarianisme, dan ekstremisme menunjukkan urgensi pembentukan karakter moderat dalam kehidupan masyarakat yang majemuk. Kondisi ini menegaskan bahwa moderasi warganegara melalui penguatan tata nilai, tata ilmu, dan tata laku menjadi kebutuhan mendesak guna menjaga kohesi sosial dan mencegah disintegrasi bangsa. Dalam hal ini, karakter moderat tidak hanya dipahami sebagai sikap sosial, tetapi sebagai esensi kewargaan yang harus ditanamkan secara sistematis dan berkelanjutan.

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran strategis sebagai wahana utama dalam membentuk karakter moderat warganegara. Melalui fungsi pengembangan wawasan, sikap, dan keterampilan kewargaan, PKn mampu menanamkan nilai toleransi, cinta damai, keadilan, serta komitmen kebangsaan. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa efektivitas PKn sangat ditentukan oleh pendekatan pembelajaran yang kontekstual, integratif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman, termasuk dalam merespons tantangan digital dan dinamika sosial.

Penelitian ini menegaskan bahwa PKn tidak hanya berfungsi sebagai media transmisi pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang transformasi nilai dan karakter moderat. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena berbasis kajian literatur sehingga belum

menyentuh verifikasi empiris di lapangan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan dan menguji model pembelajaran PKn yang inovatif dan berbasis praktik guna memperkuat implementasi pembentukan karakter moderat secara nyata.

Referensi

- Affandi, I. (2011). *Pendidikan politik*. Mutiara Press.
- Akbal, M. (2016). Pendidikan kewarganegaraan dalam pembangunan karakter bangsa. *Prosiding Seminar Nasional IPS PPS UNM*.
- Almond, G. (1996). *The civic culture: Prehistory, retrospect and prospect*. Center for the Study of Democracy, UC Irvine.
- Almond, G., & Verba, S. (1963). *The civic culture*. Princeton University Press.
- Anugrah, A., Hamid, R. Z., & Firdaus, D. N. H. (2023). The philosophy of Pancasila in the perspective of civic virtue development in the era of global disruption of the 21st century. *International Journal of Civic Literacy (IJCL)*, 2(1), 1–10.
- Arif, D. B. (2011). *Pendidikan kewarganegaraan untuk pembangunan karakter bangsa*. UAD Press.
- Awalia, R., Najamuddin, N., Alwi, A., & Ridhoh, M. Y. (2025). Pendidikan multikultural, pendidikan kedamaian, dan pendidikan inklusif: Perbedaan dan urgensinya di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Haumeni*, 5(3), 47–66.
- Azra, A. (2002). *Paradigma baru pendidikan nasional: Rekonstruksi dan demokratisasi*. Kompas.
- Azra, A. (2012). Kegagalan identitas dan kekerasan sosial: Multikulturalisme, demokrasi dan Pancasila. *Jurnal Empati*, 1(1), 1–12.
- Baisuki, A., & Ta'rif, T. (2017). Penanaman karakter moderat di Ma'had Aly Situbondo. *Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*, 15(3). <https://doi.org/10.32729/edukasi.v15i3.456>
- BPS. (2020). *Penduduk Indonesia*. Badan Pusat Statistik.
- Branson, M. S. (1998). *The role of civic education*. Center for Civic Education.
- Budiardjo, M. (1981). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia.
- Budimansyah, D. (2008). Revitalisasi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan melalui praktik belajar kewarganegaraan. *Jurnal Acta Civicus*, 1(2), 179–198.
- Budimansyah, D. (2010). *Penguatan kewarganegaraan untuk membangun bangsa*. Widya Aksara Press.
- Budimansyah, D., & Suryadi, K. (2008). *Pendidikan kewarganegaraan dan masyarakat kultural*. UPI Press.
- Crawford, J. (1820). *History of the Indian Archipelago*. Archibald Constable.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage.
- Djahiri, A. K. (2002). *Moral and character teaching values*. FPIPS UPI.
- Echols, J. M. (Ed.). (2009). *Indonesian writing in translation*. Equinox.
- Erwin, M. (2012). *Pendidikan kewarganegaraan Republik Indonesia*. Refika Aditama.
- Faris, A. I. (1979). *Mu'jam maqayis al-lughah*. Dar al-Fikr.

- Faruq, U., & Noviani, D. (2021). Pendidikan moderasi beragama sebagai perisai radikalisme di lembaga pendidikan. *Jurnal Taujih*, 14(1), 59–77.
- Fathurozi. (2017). Menolak kekerasan identitas tunggal. *Jurnal Dialog*, 40(1), 1–15.
- Hamid, R. Z., Anugrah, A., & Firdaus, D. N. H. (2023). The philosophy of Pancasila in civic virtue development. *International Journal of Civic Literacy*, 2(1), 1–10.
- Hidayat, A., & Sapriya. (2022). Penguatan moderasi beragama melalui pendidikan kewarganegaraan. *Jurnal Civics*, 19(2), 115–128. <https://doi.org/10.21831/jc.v19i2.XXXXX>
- Hornby, A. S. (1948). *Oxford advanced learner's dictionary*. Oxford University Press.
- Isep. (2013). Peranan pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan hukum. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 13(1). <https://doi.org/10.17509/jpp.v13i1.3474>
- Juliardi, B. (2015). Implementasi pendidikan karakter melalui pendidikan kewarganegaraan. *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, 2(2), 119–126.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2008). *Edisi elektronik*.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2016). *Versi offline*.
- Kemendagri. (2022). *Data penduduk Indonesia*.
- Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi beragama*.
- Laning, V. D. (2008). *Kenakalan remaja dan penanggulangannya*. Cempaka Putih.
- Latif, Y. (2011). *Negara paripurna*. Gramedia.
- Latif, Y. (2018). *Globalisasi, Pancasila dan pendidikan karakter*.
- Lickona, T. (1991). *Educating for character*. Bantam Books.
- Ma'arif, A. S. (2009). *Islam dalam bingkai keindonesiaan*. Mizan.
- Malik, A. (2020). Membangkitkan nasionalisme. *Jurnal Sosial*, 6(1), 101–108.
- Muhkam, M. F. (2022). The role of civic education learning in university as moderate education. *Proceedings IAIN Pekalongan*, 1(1), 45–56.
- Nasir, H. (2019). *Moderasi Indonesia dan keindonesiaan*. UMY Press.
- Nurhayati, N., Suryadi, K., & Komalasari, K. (2023). Pendidikan karakter moderat berbasis kearifan lokal. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 13(2), 150–162. <https://doi.org/10.21831/jpk.v13i2.XXXXX>
- Prasetyo, D., & Komalasari, K. (2023). Civic education and digital citizenship. *Journal of Social Studies Education Research*, 14(3), 210–225. <https://doi.org/10.17499/jsser.XXXX>
- Print, M., Ellickson-Brown, J., & Baginda, A. R. (1999). *Civic education for civil society*. ASEAN Academic Press.
- Putra, A., & Dewi, R. (2025). Inovasi pembelajaran PKn untuk karakter moderat. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(1), 1–15. <https://doi.org/10.20527/kewarganegaraan.v10i1.XXXXX>
- Rahman, A., & Suharno. (2024). Transformasi pendidikan kewarganegaraan dalam menghadapi polarisasi sosial. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 33(1), 25–38. <https://doi.org/10.17509/jpis.v33i1.XXXXX>
- Rezky, M. I., & Ridhoh, M. Y. (2025). Kewarganegaraan aktif dan wirausahawan sosial. *Jurnal Pendidikan Kewirausahaan*, 1–31.

- Ricklefs, M. C. (1991). *Sejarah Indonesia modern*. UGM Press.
- Ridhoh, M. Y. (2023). *Moderasi berkewarganegaraan melalui kelas PKn* (Disertasi).
- Ridhoh, M. Y., & Haris, H. (2026). Pancasila as a moderate ideology. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 6(1), 75–88.
- Ridhoh, M. Y., Zahrah, F., & Sanur, I. S. (2024). PKn sebagai resolusi konflik beragama di ruang digital. *Antroposen*, 3(1), 47–58.
- Riskawati, R., Aba, A., & Irawan, H. (2022). Community involvement in public activities. *Journal of Civic Participation*, 5(1), 1–10.
- Sadeli, E. H. (2016). *Pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana pendidikan karakter*. UMS.
- Sapriya. (2007). Peran pendidikan kewarganegaraan dalam membangun karakter. *Jurnal Sekolah Dasar*, 16(1), 22–34.
- Tan, P., Naidu, N. B. M., & Zuraini, A. (2018). Moral values in a multi-ethnic society. *The Journal of Social Studies Research*, 42(2), 119–134. <https://doi.org/10.1016/j.jssr.2017.05.004>
- Thambosamy, R., & Elier, A. (2013). Character education in Malaysia. *Childhood Education*, 89(6), 368–378.
- Winataputra, U. S., et al. (2008). *Materi dan pembelajaran PKn SD*. Universitas Terbuka.
- Zamroni. (2001). *Pendidikan untuk demokrasi*. Bigraf.